

Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan di Pesisir Kabupaten Polewali

Yusriah

IAI DDI Polewali Mandar

e-mail: yusriah77@ddipolman.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan perempuan (Istri Nelayan) yang bermukim di wilayah pesisir Polewali mandar terhadap kegiatan ekonomi mereka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei sample. Populasi penelitian adalah semua istri nelayan yang tinggal dipesisir desa karama dan desa pambusung yang jumlahnya sebanyak 800 orang. Besarnya sample ditetapkan berdasarkan tabel Krejcie sebanyak 260 orang dan dipilih secara acak sistematis (*Systematic Random Sampling*). Teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang disiapkan terlebih dahulu. Data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis regresi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan berhasil meningkatkan pendapatan perempuan di daerah pesisir dan mendorong perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mereka.

Kata kunci: pemberdayaan, perempuan, ekonomi kerakyatan

Abstract: *The Objective of this research is to know the effect of women (Fishermen's wives) living at coastal area of Polewali regency based on their economic activities. This research has been carried out using survei method. The target population are all fishermen's wives at coastal area Karama and Pambusung Villages which number 800 women based on Krejcie table and they are chosen by systematic random sampling. Technique of data collection using quistionnaires. The regression model is used to analyse the data. The research findings reveal that women empeworment has succesfully increased women's income in teh coastal area and induced women to participate in teh economic activities in the region.*

Keywords: *empeworment, women, people-based economy*

Pembangunan saat ini menjadi isu strategis yang sangat gencar diperbincangkan oleh negara-negara di dunia terutama negara-negara berkembang. Pembangunan menuntut suatu negara untuk bekerja keras agar dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Agar pembangunan yang berkelanjutan terwujud dibutuhkan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan adalah suatu wujud pembangunan nasional yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditujukan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada.

Berbicara mengenai ekonomi paling tidak kita kembali mengingat lahirnya ilmu ekonomi, karena adanya kelangkaan (*scarcity*) sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam jenis kualitas maupun kuantitasnya. Di satu sisi, keluarga dalam kelangsungan hidupnya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, bukan karena yang satu bapak atau ibu dan lainnya anak, tetapi perbedaan itu karena banyak faktor.

Membahas masalah keluarga maka perlu kita ketahui bahwa keluarga dalam bentuknya yang paling sederhana atau asasi terdiri atas laki-laki (suami) dan perempuan (istri), hidup dalam ikatan perkawinan beserta anak-anaknya. Kebutuhan dasar mereka meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, keluarga dalam satu rumah tangga paling tidak mempunyai kebutuhan minim yang mengacu pada pengertian *basic needs*.

Setiap anggota keluarga mempunyai peranannya sendiri-sendiri dalam menopang kehidupan keluarga. Secara ideal seorang suami yang juga berstatus kepala keluarga mempunyai tanggungjawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk juga dalam memasok pendapatan keluarga. Namun demikian terkadang kondisi yang cukup berat menyebabkan minimnya pendapatan yang diperoleh suami sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih kurang.

Dalam pemenuhan kebutuhan ini, peran perempuan (istri) sangat diperlukan sebagai ibu rumah tangga yang bijaksana dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga mereka dan berbagai aktivitas mereka kerjakan serta melakukan usaha sampingan. Namun kadang usaha yang dilakukan oleh istri-istri jarang yang berhasil, hal ini karena ketiadaan modal, ketiadaan keterampilan serta ketiadaan minat dan dorongan.

Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, perlu penemuan bentuk baru dan langkah-langkah koreksi dalam penetapan kebijaksanaan pembangunan yang memungkinkan terjadinya demokrasi ekonomi dan persaingan yang sehat. Salah satu bentuk implementasi demokrasi ekonomi yang sangat relevan dewasa ini adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dan perempuan.

Menurut Poli (1991) pembangunan ekonomi dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, yang merupakan salah satu dari proses pembangunan yang bersifat multidimensional maka paling tidak ada tiga sasaran pokok pembangunan ekonomi yakni (1) peningkatan pendapatan (2) perluasan kesempatan kerja (3) pemerataan pendapatan.

Peningkatan pendapatan harus diupayakan secepatnya dalam setiap tahunnya dengan alasan (1) pendapatan perkapita Indonesia masih sangat rendah, (2) kebutuhan setiap warga Indonesia meningkat dengan cepat yang disebabkan oleh sifat manusiawi dan perkembangan teknologi, (3) penambahan pendapatan perkapita yang cepat dibutuhkan agar dapat terbebas dari masalah krisis ekonomi. Manusia dalam pembangunan ekonomi

merupakan sumber daya yang sangat penting (Abustam, 1997)

Pembangunan ekonomi adalah bagaimana cara menaikkan pendapatan serta produktiviteit per kapita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Arief, 1999). Adapun menurut Sumodiningrat (1998) pembangunan ekonomi kita bertumpu pada trilogi pembangunan.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang berlangsung selama beberapa dasawarsa terakhir ternyata mendorong terciptanya struktur ekonomi yang timpang. Sebagian besar sumber ekonomi dan perekonomian Indonesia terkonsentrasi kepada kelompok kecil tertentu yakni kelompok yang dikenal dengan sebagai konglomerat. Dalam proses pembangunan konglomerat berhasil membanguun hubungan simbiosis dengan elite kekuasaan dan para birokrat, dan melalui hubungan ini terjadilah apa yang disebut oleh Sritua Arief (2002) sebagai *distributional*. Koalisi ini merupakan suatu jaringan mirip kartel yang bertujuan untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin, antara lain dengan penggunaan asset-asset ekonomi melalui hak-hak istimewa.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi kerakyatan adalah model pembangunan yang berbasis pada masyarakat sebagai intinya. Dalam hal ini pembangunan yang terjadi tetap berjalan diatas rel hukum ekonomi dalam membangun kemandirian komunitas dan tetap dapat dilanjutkan secara ekonomi, sosial maupun ekologi dengan cara mempertemukan kepentingan berbagai elemen pembangunan yang ada (Bobo, 2003). Menurut Beith (2001) ekonomi kerakyatan adalah susunan ekonomi kerakyatan adalah susuna dan tatanan kegiatan atau aktifitas dalam komunitas suatu abngsa yang merupakan penjumlahan dari kreatifitas manusi memberdayakan fakto-faktor sumber daya alam, teknologi, modal, keterampilan manajerial yang ditunjang oleh kaidah regional maupun nasioanal, serta terpateri dengan rasa kemanusiaan dan

keyakinan agama dalam ruang dan lingkup kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural (*structural adjustment* atau *structural transformation*), yaitu dengan memperkuat kedudukan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian.

Perubahan struktural mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi, penguatan kelembagaan, pengalokasian sumber daya, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam upaya ini menurut Sumodiningrat (1998), pilihan kebijaksanaan dilaksanakan beberapa langkah strategis.

Pertama yaitu pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. Akses yang paling mendalam adalah pemberian dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat.

Kedua yaitu dengan memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Usaha dalam memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ini adalah pendekatan kebersamaan, dengan membangun kesetiakawanan dan rasa kesamaan yang akan menimbulkan rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi keterbukaan ekonomi.

Ketiga yaitu dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait industr besar. Proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro industri. Kelima, kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wiausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Keenam, pemerataan

pembangunan antar daerah. Dengan cara ini pembangunan diharapkan akan lebih kukuh dan berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan nasional secara absolut, telah mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun dengan itu, masalah kemiskinan juga menjadi semakin kompleks, menyangkut bermacam aspek kehidupan yang bersifat multi-dimensi. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi tinggi.

Bantuan pembangunan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dipandang sebagai sebuah suntikan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, dan bukan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak yang harus diterima rakyat. Bantuan dari pemerintah suatu saat harus dihentikan dan sebaliknya menjadi kewajiban rakyat untuk mengembalikan hasilnya kepada Negara.

Pembangunan ekonomi ditujukan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada tidak terkecuali penduduk yang mendiami wilayah pesisir, utamanya daerah terpencil dan kepulauan yang masih kurang tersentuh, sebagaimana masyarakat daratan. Dalam hal ini diperlukan perhatian dan peran pemerintah mengingat masyarakat pesisir masih memiliki kekurangan dari segi pelayanan fasilitas dalam segala aspek baik kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan jumlah pulau karang lebih 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Dahuri, 2000). Sebagian besar penduduk indonesia hidup dan tinggal diwilayah pesisir sekitar 60 persen. Ini menggambarkan bahwa separuh dari masyarakat pesisir mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Maka dibutuhkan pembangunan wilayah pesisir dan lautan dengan paradigma pembangunan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan para pelaku pembangunan secara adil dan terpeliharanya daya dukung serta kualitas lingkungan secara seimbang.

Melihat wilayah pesisir di Kabupaten Polewali yang merupakan salah satu daerah yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan dan kesemuanya dilakukan oleh kaum lelaki (suami) dan mereka tergolong masyarakat miskin, maka perlu diadakan suatu upaya atau usaha dalam menangani kemiskinan ini.

Berdasarkan fakta yang ada bahwa keseharian masyarakat pesisir Kabupaten Polewali mandar khususnya keluarga nelayan yang masih diliputi masalah perekonomian, seringkali mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi inipun terlihat jelas dimana para perempuan (istri nelayan) turut serta membantu suaminya dalam menopang ekonomi keluarga, hal ini dilakukan karena minimnya pendapatan yang diperoleh suami sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kurang. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan untuk membangun daya (masyarakat) dalam membangkitkan potensi yang dimiliki guna mengangkat harkata dan martabat serta meningkatkan kualitas hidup. Menurut Harijani (2001) pemberdayaan perempuan merupakan upaya perempuan membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan sehingga mereka bisa hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perempuan bukanlah beban pembangunan, melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan (Suyanto, 1996)

Peranan pemerintah daerah kabupaten Polewali maupun lembaga-lembaga yang bukan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan cukup besar, telah banyak kegiatan yang dilakukan salah satunya melalui advokasi dan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya perempuan.

Mengingat kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu wilayah pesisir namun pemberdayaan secara optimal di sektor perikanan belum memberikan nilai maksimal. Dimana sebagian besar penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir tersebut sebagai nelayan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya dan rendahnya sistem informasi sumber daya dan pemasaran yang ada serta akses permodalan masyarakat yang tidak menunjang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas nampak bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dalam meningkatkan ekonomi lokal belum maksimal hal ini disebabkan oleh dua masalah baik secara internal maupun eksternal. Dimana masalah internal berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar dan masalah eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi perkembangan sumber daya alam dan keikutsertaan pemerintah. Inilah yang menjadi pemicu bagi penulis dalam mengangkat judul penelitian "Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan di Pesisir Kabupaten Polewali"

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut (1) Sejauh mana keterlibatan perempuan dalam ekonomi kerakyatan di pesisir kabupaten polewali? (2) Sejauh mana pemerintah dan non pemerintah melakukan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kerakyatan di pesisir kabupaten polewali? (3) Bagaimanakah pengaruh pelatihan dan modal dalam ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan pendapatan di pesisir kabupaten polewali?

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Sejauh mana keterlibatan perempuan dalam ekonomi kerakyatan di pesisir kabupaten polewali. (2) Untuk mengetahui Sejauh mana pemerintah dan non pemerintah melakukan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kerakyatan di pesisir kabupaten polewali. (3) Untuk mengetahui Bagaimanakah pengaruh pelatihan dan modal dalam ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan pendapatan di pesisir kabupaten polewali.

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Sebagai bahan

masuk dan informasi bagi penentuan kebijakan pemerintah setempat dalam rangka pembangunan dibidang keperempuanan terutama bagi perempuan nelayan. (2) sebagai bahan masukan bagi kelompok nelayan dan pemerhati perempuan, juga sebagai sumbangan terhadap pengemban ekonomi kerakyatan. (3) sebagai dokumentasi Khasanah budayabangsa tentang peranan perempuan di Indonesia. (4) Sebagai bahan kajian bagi peneliti yang relevan dengan pokok permasalahan ini.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah pesisir kabupaten Polewali yang terletak diwilayah kecamatan Balanipa dan kecamatan Tinambung tepatnya di Desa Pambusuang dan desa Karama. Lokasi ini dijadikan sample dengan mengingat berbagai hal. Pertama, wilayah ini merupakan daerah pesisir yang lain dengan jumlah penduduk perempuan yang besar. Kedua, daerah ini sebagian besar kaum laki-laknya adalah nelayansehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sang istrilah yang banyak melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, tingkat pendapatan masyarakat daerah ini tergolong rendah.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari suatu populasi dengan upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif dan data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kerakyatan dipesisir kabupaten Polewali.

Variabel dan Desain Penelitian

Variabel yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (terikat) yaitu peningkatan pendapat (Y) Variabel independen (Bebas) yaitu pemberdayaan perempuan dapat dirincikan sebagai berikut: Pelatihan (X_1) dan Modal (X_2).

Definisi Operasional Variabel

Pelatihan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu guna peningkatan kualitas pada diri seseorang. Modal merupakan alat yang digunakan baik dalam bentuk uang maupun barang untuk menjalankan suatu usaha serta meningkatkan pendapatan melalui usaha yang dijalankan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut: (1) wawancara, (2) observasi, (3) dokumentasi. Data yang diperoleh adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari tiap responden dengan teknik wawancara yang didukung dengan observasi dan data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Populasi dan Sample

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perempuan (istri nelayan) dipesisir kabupaten Polewali. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara acak sistematis dengan alasan bahwa sampel yang akan diteliti memiliki sifat homogen dapat dilihat dari hal-hal seperti: seluruh responden adalah istri nelayan dan bermukim diwilayah pesisir sedangkan untuk penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan tabel Krejcie, dimana Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalah 5 persen, jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95 persen terhadap populasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 800 orang dengan pengambilan sampel sebanyak 260 orang.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Analisis statistik deskriptif. (2) Analisis statistik inferensial. Persyaratan uji analisis inferensial dapat digunakan dengan pengujian normalitas dan pengujian linearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Polewali adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan ibukota kabupaten terletak di Polewali, secara administratif terbagi atas 15 kecamatan dan 130 desa, ini setelah kecamatan mamasa mamisahkan diri. Wilayah kabupaten Polewali sebagian besar merupakan suatu gabungan dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran perbukitan. Sehingga secara umum kabupaten Polewali dapat dibagi atas 2 wilayah yaitu bagian wilayah pantai (dataran rendah) bagian wilayah perbukitan (dataran tinggi).

Kabupaten Polewali berdasarkan hasil sensus penduduk 2003 jumlah penduduk kabupaten Polewali sebanyak 338.897 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 163.314 dan wanita sebanyak 175.583 jiwa. Penduduk merupakan subjek dan objek dalam pembwali sebanyak 338.897 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 163.314 dan wanita sebanyak 175.583 jiwa. Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan dalam arti perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh penduduk dalam wilayah yang bersangkutan.

Umur Responden

Umur merupakan gambaran yang dapat dilihat dari seseorang sehingga memudahkan penulis untuk memahami responden. Umur dalam penelitian ini menjelaskan terhadap keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan dan kegiatan ekonomi kerakyatan dipesisir kabupaten Polewali. Umur responden dapat dilihat pada Tabel 1.

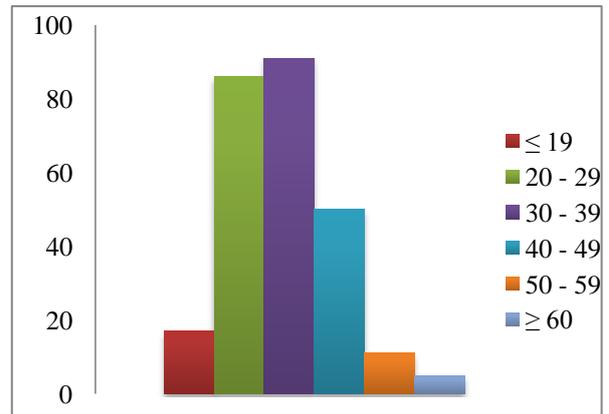
Tabel 1 Distribusi Responden Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	≤ 19	17	6,54
2	20 – 29	86	33,08
3	30 – 39	91	35,00
4	40 – 49	50	19,23
5	50 – 59	11	4,23
6	≥ 60	5	1,92
Jumlah		260	100,00

Sumber: Survei lapangan 2003

Tabel 1 menunjukkan dari 260 responden, distribusi umur yang paling banyak adalah pada usia 30 – 39 tahun dengan frekuensi 91 orang

atau sekitar 35 persen. Yang paling sedikit pada usia 60 tahun keatas dengan frekuensi 5 orang atau sekitar 1,92 orang. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 1.



Gambar 1. Histogram umur responden

Berdasarkan hasil analisis deskriptif distribusi umur responden, maka dapat disimpulkan bahwa umur responden dalam penelitian ini termasuk usia produktif untuk melakukan kegiatan ekonomi

Pendidikan Responden

Pendidikan adalah indikator kemajuan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan hal yang penting karena dengan pendidikan kualitas manusi dapat diukur. Pendidikan tidak hanya melalui pendidikan formal namun bisa juga didapat dari pendidikan nonformal. Rendahnya tingkat pendidikan didaerah pedesaan banyak terjadi pada perempuan dimana masih ada anggapan bahwa seorang perempuan tidaklah harus mengecapa pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya seorang perempuan akan kembali ke kodratnya masing-masing dan dengan adanya anggapan tersebut menjadikan seorang perempuan enggan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan demikian akan mempengaruhi potensi yang ada pada diri perempuan dan keadaan mereka. Tingkat pendidikan perempuan didaerah pesisir dapat dilihat pada Tabel 2.

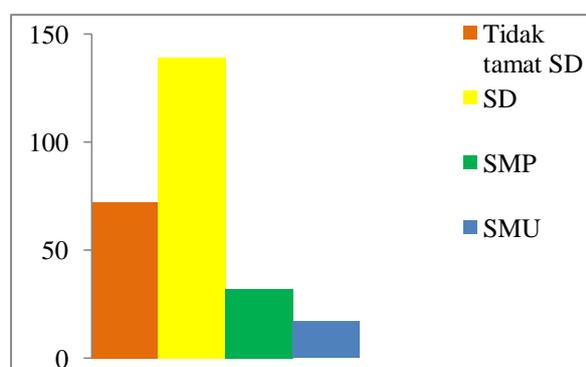
Rendahnya pendidikan yang diikuti mengakibatkan seseorang akan kurang pengetahuan dan keterampilannya sehingga sulit untuk memasuki lapangan kerja disektor formal sehingga menuntut responden untuk responden

memasuki lapangan kerja yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi untuk lebih jelasnya lihat Gambar. 2

Tabel 2 Distribusi responden menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	Tidak tamat SD	72	27,69
2	SD	139	53,46
3	SMP	32	12,31
4	SMU	17	6,54
Jumlah		260	100,00

Sumber: Survei Lapangan 2003



Gambar 2 Histogram tingkat pendidikan responden

Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan ketenagakerjaan

Jenis Kelamin	Kecamatan	Angkatan Kerja				Jumlah	Persentase
		Bekerja		Mencari Kerja			
		Jumlah	%	Jumlah	%		
Laki-laki	Tinambung	4.500	91,58	414	8,42	4.914	100,00
	Balanipa	6.138	99,47	33	0,53	6.171	100,00
Perempuan	Tinambung	3.444	88,17	462	11,87	3.906	100,00
	Balanipa	4.154	97,10	124	2,90	4.278	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Polewali 2003

Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa angkatan kerja pada usia 10 tahun keatas di daerah pesisir kabupaten Polewali untuk jenis kelamin laki-laki masih banyak dibandingkan perempuan.

Jenis Pekerjaan

Pekerjaan perempuan di wilayah pesisir kabupaten Polewali bervariasi, dalam keseharian mereka selain sebagai ibu rumah tangga ada yang bekerja sebagai pedagang, penenun, buruh ikan dan pembuat tali. Semua ini dikerjakan untuk membantu suami mereka yang sebagai nelayan dalam menunjang kehidupan keluarga dan menambah pendapatan mereka. Perempuan yang bekerja cenderung memiliki pendapatan yang

Ketenagakerjaan

Menurut Tadjuddin Noer Effendi (1995) analisis kedudukan perempuan dapat memberikan pemahaman bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan penghapusan ketidaksamaan peran dalam masyarakat, terutama dalam pasar tenaga kerja. Latar belakang sosial budaya yang diwarnai oleh pengalaman perbedaan perempuan dan laki-laki dalam realitas kehidupan menyebabkan gender dipandang sebagai persoalan universal. Beberapa kenyataan dipasar kerja dapat dikatakan bahwa status pekerja perempuan dan pekerja laki-laki berbeda karena adanya hambatan struktural sebagai akibat ketimpangan distribusi kekayaan, pendidikan, keterampilan dan akses pada peluang kerja seperti yang terjadi di daerah pesisir kabupaten Polewali dimana pekerja laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan.

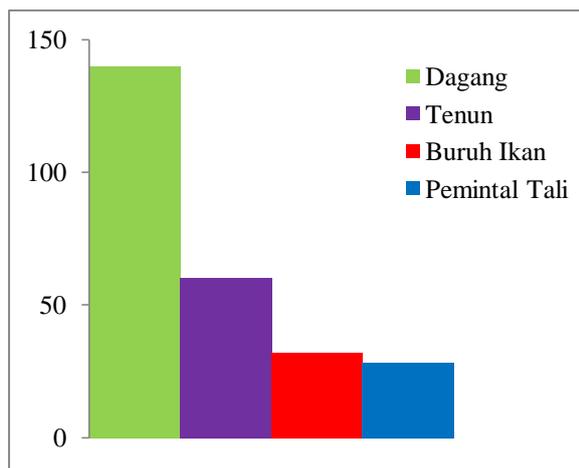
lebih tinggi dari perempuan yang tidak bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi responden menurut pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Dagang	140	53,85
2	Tenun	60	23,08
3	Buruh Ikan	32	12,30
4	Pemintal Tali	28	10,77
Jumlah		260	100,00

Sumber: Survei lapangan 2003

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dikatakan bahwa perempuan dipesisir masih aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Histogram jenis pekerjaan responden

Pekerjaan responden dalam penelitian ini merupakan pekerjaan yang tergolong kedalam sektor nonformal. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang telah mereka tempuh.

Jumlah Anak

Anak merupakan karunia yang diberikan tuhan kepada manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak sangat berpengaruh terhadap aktifitas seorang perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena sebagian waktu yang mereka miliki digunakan untuk mengurus anak-anak mereka sehingga waktu yang mereka pakai untuk kegiatan ekonomi sangat minim dan ini berpengaruh juga terhadap pendapatan mereka, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Distribusi responden menurut jumlah anak

No	Jumlah Anak	Frekuensi	Persentase
1	0 – 1	53	20,38
2	2 – 3	70	26,93
3	4 – 5	56	21,54
4	6 – 7	81	31,15
Jumlah		260	100,00

Sumber: Survei lapangan 2003

Hasil analisis dekriptif menggambarkan bahwa distribusi responden menurut jumlah anak yang paling tinggi adalah 81 atau 31,15 persen yaitu sekitar 6 sampai 7 anak

Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan dipesisir Kabupaten Polewali

Program pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan dipesisir kabupaten Polewali melalui dua cara yaitu pelatihan dan modal. Ada beberapa jenis pelatihan yang pernah dilakukan di pesisir kabupaten Polewali yang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Distribusi responden menurut jenis pelatihan

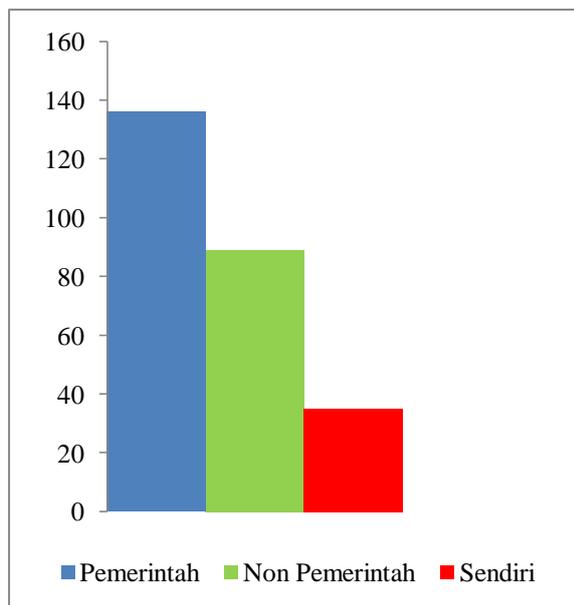
No	Jenis	Frekuensi	Persentase
1	Tata Boga	99	38,08
2	Tenun	73	30,00
3	Menjahit	59	23,84
4	Tidak Pernah	21	8,08
Jumlah		260	100,00

Sumber: Survei lapangan 2003

Pemberian pinjaman modal termasuk pemberdayaan yang dilakukan dipesisir kabupaten Polewali selain pelatihan. Modal diberikan kepada responden tidak secara Cuma-Cuma melainkan dengan cara dipinjamkan. Kepada responden yang mau menggunakan modal tersebut untuk menambahkan modal yang telah ada atau sebagai modal dalam mengembangkan usaha mereka maupun sebagai modal dalam mengembangkan usaha. Modal yang diberikan kepada perempuan dalam penelitian ini adalah uang. Jumlah yang diberikan berbeda tetapi dengan melihat banyaknya kebutuhan responden. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan permintaan responden dengan kesanggupannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 5

Tabel 7 Distribusi responden menurut sumber modal

No	Sumber Modal	Frekuensi	Persentase
1	Pemerintah	136	52,31
2	Non Pemerintah	89	34,23
3	Sendiri	35	13,46
Jumlah		260	100,00



Gambar 5 Histogram sumber modal

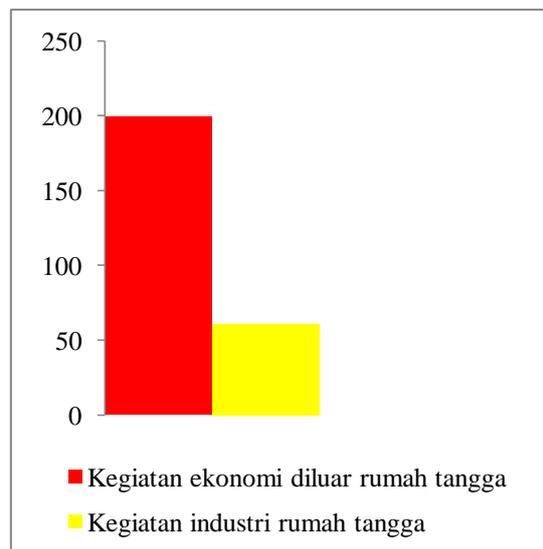
Keterlibatan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan di Pesisir Kabupaten Polewali

Perempuan pesisir pada semua lapisan sosial ekonomi memberikan sumbangan nyata baik dalam kegiatan diluar rumah tangga yang secara langsung memberikan penghasilan maupun kegiatan rumah tangga yang tidak langsung memberikan imbalan. Kegiatan perempuan pesisir yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat menghasilkan uang atau barang.

Aktivitas perempuan pesisir menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara terus menerus. Kegiatan ekonomi perempuan dipesisir dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan merupakan pekerjaan pokok dan bukan pekerjaan pokok namun mendapatkan penghasilan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 6.

Tabel 8 Distribusi responden menurut kegiatan ekonomi perempuan

No	Kegiatan Ekonomi	Frekuensi	Persentase
1	Kegiatan ekonomi diluar rumah tangga	199	76,54
2	Kegiatan industri rumah tangga	61	23,46
Jumlah		260	100,00



Gambar 6 kegiatan ekonomi responden

Keterlibatan perempuan pesisir dalam ekonomi kerakyatan dapat diketahui dengan melihat jenis pekerjaan mereka yang mana dari data penelitian dapat dilihat jenis pekerjaan responden seluruhnya adalah merukan jenis kegiatan ekonomi rakyat maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi kerakyatan dipesisir kabupaten Polewali sangat besar.

Peranan Pemerintah dan Non Pemerintah Melakukan Pemberdayaan dalam Ekonomi Kerakyatan di Pesisir Kabupaten Polewali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan pemberian pinjaman modal mempunyai andil yang cukup besar dikabupaten polewali. Pengaruh pemberian pinjaman modal yang diberikan cukup baik hal ini masih berkaitan dengan peranan pemerintah dan non pemerintah dalam memimnjamkan modal kepada perempuan pesisir semakin sering pemberian pinjaman modal dilakukan maka akan semakin berpengaruh terhadap pengembangan usaha perempuan dan akan mempengaruhi tingkat pendapatan responden.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah maupun non pemerintah dalam mendukung laju pertumbuhan ekono dipesisir sangat baik. Dalam hal ini pula dapt disimpulkan bahwa peranan pemerintah dan non

pemerintah memberdayakan perempuan dalam ekonomi kerakyatan sudah cukup besar tetapi masih diharapkan terjadi peningkatan yang akan menyokong laju pembangunan khususnya diekonomi kerakyatan

Harijani (2001) dalam penelitian mengemukakan bahwa keikutsertaan pemerintah maupun non pemerintah melakukan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kerakyatan nampak jelas dimana didesa kareng semi mereka mereka menciptakan program-program agar upaya yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan mereka melalui program terpadu yang bertujuan meningkatkan pendapatan dengan pembinaan perempuan yang menggunakan pendekatan lintas sektoral dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan. Penelitian tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan terhadap perempuan pesisir di kabupaten Polewali namun keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan namun bentuk pelaksanaannya saja yang berbeda.

Pengaruh Pelatihan dan Modal dalam Ekonomi Kerakyatan terhadap Peningkatan Pendapatan Perempuan di Pesisir Kabupaten Polewali

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan pesisir kabupaten Polewali melalui pelatihan dan peminjaman modal mampu mengubah pola hidup dan pola pikir perempuan dipesisir sehingga perempuan pesisir mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dan mampu mengembangkan keterampilan dan usaha mereka serta menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan perempuan di wilayah pesisir kabupaten polewali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi kerakyatan dipesisir kabupaten Polewali sangat besar dengan melihat aktivitas perempuan pesisir yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dipesisir kabupaten Polewali beralngsung terus menerus
2. Peranan pemerintah dan non pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kerakyatan dipesisir kabupaten Polewali melalui pelatihan dan pemberian pinjaman modal sudah cukup berpengaruh terhadap perempuan yaitu dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta bertambahnya modal yang mereka miliki
3. Ada pengaruh positif pelatihan dan modal ekonomi kerakyatan terhadap pendapatan di pesisir kabupaten polewali.

Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi perempuan yang ada dipesisir supaya turut berpartisipasi dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah maupun non pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Upaya pemberdayaan yang dilakukan bagi perempuan pesisir kabupaten polewalidengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka maka perlu ada perhatian pemerintah daerah maupun non pemerintah yang memberikan bantuannya utama bagi perempuan yang hidup dipesisir.
3. Disarankan agar masyarakat membentuk sebuah wadah seperti koperasi untuk mempermudah perjuangan dan membela kepentingan mereka dalam memperkuat posisi mereka sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abustam, I. 1997. *Penelitian Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan Kualitas Lingkungan di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: FPIPS IKIP Ujung Pandang

- Arief, M. I. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Unjung Pandang: Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan.
- Arief, S. 2002. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Beith, A. F. 2001. *Sosialisme Kerakyatan yang Islami Bagian Ekonomi Kerakyatan*. Yayasan Almunawarah.
- Bobo, J. 2003. *Transpormasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Cidesindo.
- Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: LIPSI.
- Efendi, T. N. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Harijani, D. R. 2001. *Etos Kerja Perempuan Desa*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Poli, W. I. M. 1991. "Wawasan Perencanaan Pembangunan" Ceramah untuk Staff Baoedda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Sumodiningrat, G. M. 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suyanto, B. 1996. *Pemberdayaan dan kesetaraan perempuan*. Majalah Prisma No 5 Tahun XXV, Mei 1996, Jakarta.